

ABSTRAK

Penelitian dalam tugas akhir ini membahas tentang perlindungan hukum bagi Pemodal dalam layanan urun dana berbasis teknologi informasi (*securities crowdfunding/SCF*) yang ada di Indonesia. Adapun kemudian pokok bahasan dalam penelitian ini adalah bagaimakah bentuk hubungan hukum para pihak berdasarkan POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi serta bagaimakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan OJK terhadap pengguna khususnya Pemodal pada layanan urun dana berbasis teknologi di Indonesia. Tujuannya adalah guna mengetahui dan memahami bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Pemodal dalam layanan urun dana berdasarkan regulasi yang ada serta untuk mengkaji bagaimana bentuk hubungan hukum dari para pihak. Metode penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa para pihak dalam penyelenggaraan SCF saling berhubungan satu-sama lain. Kemudian perlindungan hukum secara preventif maupun represif bagi pengguna SCF khususnya Pemodal terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan serta POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.

Kata Kunci: Hubungan Hukum; Perlindungan Hukum; Pemodal.

ABSTRACT

The research in this final project discusses legal protection for investors in securities crowdfunding (SCF) services in Indonesia. The primary focus of this research is what kind of form of the legal relationship between the parties based on POJK Number 57/POJK.04/2020 and what kind of legal protection provided by OJK to users, especially for investors in SCF. The aim of this research is to know and understand how the form of legal protection provided to investors in crowdfunding services based on existing regulations and to examine the form of legal relations between the parties. The research method used in this final project is a normative juridical research method with a statute approach. Based on the results of the research conducted, it can be ascertained that the parties in implementing SCF are interconnected with each other. Afterward preventive and repressive legal protection for SCF users, especially investors, are contained in Law Number 8 of 1995 of Capital Markets, Law No. 21 of 2011 on Financial Services Authority, POJK Number 1/POJK.07/2013 on Consumer Protection in the Financial Services Sector and POJK Number 57/POJK.04/2020 on Securities Offering Through Crowdfunding Services Based on Information Technology.

Keywords: Legal Relations; Legal Protection; Investors.